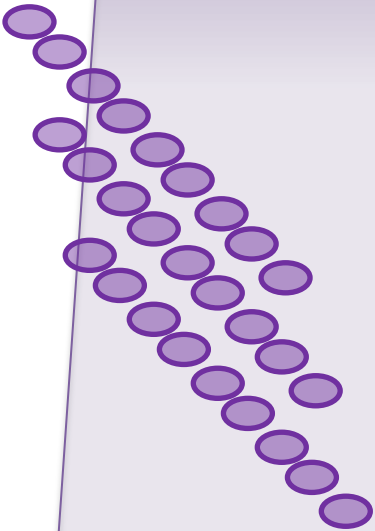


BAB I. PENDAHULUAN





BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan yang dilaksanakan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis mendalam terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

“Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019”

Makna dari visi tersebut adalah :

Maju berkualitas bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil



pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitas tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

Kemandirian bermakna bahwa Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan

Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis diarahkan pada pemantapan pengembangan hasil-hasil pembangunan meliputi pencapaian daya saing keunggulan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, ketersediaan infrastruktur yang baik serta pengelolaan lingkungan dengan fokus pada pembangunan perdesaan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Diharapkan pencapaian



kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Ciamis terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional.

Hal sangat mendesak dan penting dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh adalah terwujudnya stabilitas harga-harga dan terkendalinya inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa karena terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat.

Perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup masyarakat, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti : perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Kegiatan di atas mampu mengubah pola pendapatan masyarakat yang berkaitan erat dengan pola konsumsi masyarakat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumahtangga sehari-hari. Kenaikan atau penurunan barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan



kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Secara umum angka inflasi mampu menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Pada tingkat mikro seperti rumah tangga/masyarakat dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan buku **Pendataan dan Analisis Harga-harga Kabupaten Ciamis Tahun 2017** adalah memperoleh gambaran rinci bagaimana perkembangan harga-harga di tingkat konsumen di Kabupaten Ciamis selama rentang waktu Tahun 2017 dan sekaligus pula dapat memberikan evaluasi tentang upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu diimbangi oleh perkembangan harga-harga di tingkat masyarakat, dan menunjukkan naik turunnya daya beli yang diinginkan.



1.3. Manfaat Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumahtangga sehari-hari. Kenaikan atau penurunan barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Adapun kegunaan data IHK antara lain :

1. Indeksasi upah/gaji.



2. Indikator moneter/perkembangan nilai uang.
3. Asumsi APBN.
4. Salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi.
5. Indeksasi nilai tambah bisnis, dan lain-lain.

Angka inflasi merupakan angka gabungan (agregat) dari perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan dianggap mewakili seluruh barang dan jasa yang dijual pasar. Harga barang dan jasa itu sendiri sebagian besar ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan (*demand and supply*), sebagian lagi ditentukan dengan kebijakan pemerintah seperti harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL), tarif angkutan, harga dan lain-lain. Oleh karena itu untuk mengetahui sumber pemicu inflasi, maka perlu diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barang dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan stock. Produksi yang berlebihan dan distribusi barang yang lancar seperti terjadi pada musim panen raya akan menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar (*excess supply*) dan harga/inflasi akan turun, demikian juga sebaliknya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang berkaitan dengan daya beli masyarakat adalah perilaku, selera dan jumlah konsumsi. Perilaku permintaan konsumen akan barang dan jasa juga dipengaruhi oleh faktor musim, hari raya/lebaran dan tahun ajaran baru.



3. Kebijakan fiskal pemerintah, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap harga barang dan jasa.

Mengingat begitu luasnya faktor-faktor sumber pemicu inflasi, baik yang bersifat internal yaitu kondisi pasar itu sendiri, maupun eksternal yaitu kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian makro yang saling terkait, maka sulit diidentifikasi besarnya faktor tunggal penyebab inflasi. Dengan demikian akan sulit juga memprediksi secara pasti besarnya tingkat inflasi yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.

1.4. Cakupan Indeks Harga Konsumen

Badan Pusat Statistik terakhir kali melaksanakan Survei Biaya Hidup Tahun 2012 di 66 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 33 kabupaten/kota yang perekonomiannya relatif tinggi dan kemudian Tahun 2012 dijadikan tahun dasar dalam perhitungan IHK yang ada saat ini. Paket komoditas yang diperoleh antara 284 – 441 jenis barang/jasa dengan tahun dasar perhitungan IHK 2012 = 100, serta IHK disajikan dalam 7 kelompok dan 35 sub kelompok pengeluaran. Dari 33 sampel kabupaten/kota, 7 kota diantaranya tersebar di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya dan Kota Depok. Sedangkan kabupaten/kota di luar sampel Survei Biaya Hidup dapat menggunakan paket komoditas hasil SBH kota sampel dengan pendekatan kesamaan karakteristik kabupaten/kota SBH (*sister city*). Setelah melalui tahapan



analisis karakteristik yang menggunakan pola pengeluaran Susenas 2012 sebagai acuan analisis, diperoleh kesamaan karakteristik konsumsi masyarakat Kabupaten Ciamis dengan Kota Tasikmalaya, sehingga penghitungan IHK Kabupaten Ciamis menggunakan pola pendekatan (rujukan) Nilai Konsumsi Kota Tasikmalaya. Pada Tahun 2017 ini kembali Badan Pusat Statistik melaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2017 yang nantinya akan dijadikan tahun dasar dalam penghitungan IHK menggantikan tahun dasar 2012.